

BAB I

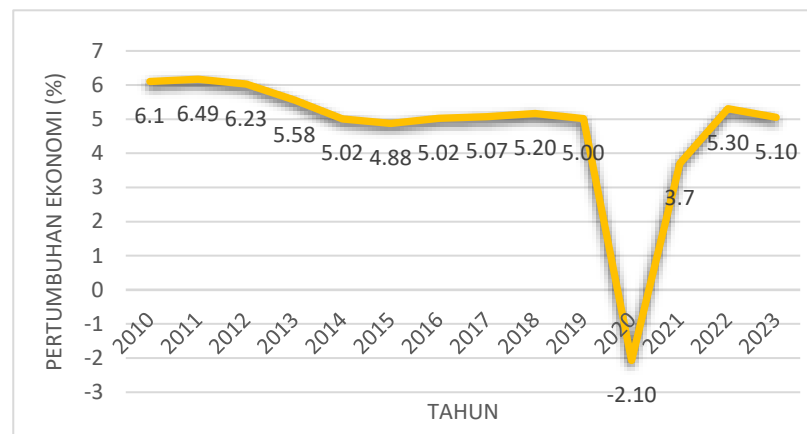
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya produk domestik bruto yang didukung oleh stabilitas sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Miskhin dan Eakins (2009) menyatakan bahwa sektor keuangan menjalankan *intermediary function* dalam menstabilkan dan memajukan perekonomian. *Intermediary function* merupakan salah satu tugas lembaga keuangan dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Hubungan keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah digambarkan di seluruh studi ekonomi yang cenderung berbeda secara substansial yang mungkin disebabkan oleh perbedaan fitur, struktur dan ukuran pasar (Hondroyiannis *et al.*, 2005). Hubungan ini memiliki dua argumen teoritis dasar yang diajukan dalam literatur yakni hipotesis yang mengikuti permintaan dan yang memimpin penawaran (Chettri, 2022). Hipotesis yang mengikuti permintaan berargumen bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi akan menciptakan permintaan terhadap jasa dan instrumen keuangan. Hipotesis ini yang pada akhirnya mengarah pada perkembangan keuangan dan didukung baik secara teoritis maupun empiris oleh banyak peneliti (Ang & Mckibbin, 2007; Apergis *et al.*, 2007).

Gambar 1.1 di bawah ini menggambarkan perkembangan PDB (y-on-y) Indonesia yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. PDB Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 5 persen dan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 sebesar -2,10 persen yang disebabkan pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor tak terduga seperti pandemi covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan kembali tumbuh pada tahun 2021 sebesar 3,70 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,10 persen. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.



Gambar 1. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2023

Sumber: Bank Indonesia (2024)

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara meliputi perkembangan dari sektor keuangan yang berlangsung dengan proses bertambah dan berkembangnya lembaga, pasar dan instrumen keuangan yang dapat mendukung peningkatan investasi untuk pembangunan ekonomi (Chettri, 2022). Peneliti keuangan yang sebagian besar melakukan analisis lintas negara, berpendapat bahwa kemajuan sektor keuangan mengambil peran penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Levine, 1997). Sektor keuangan

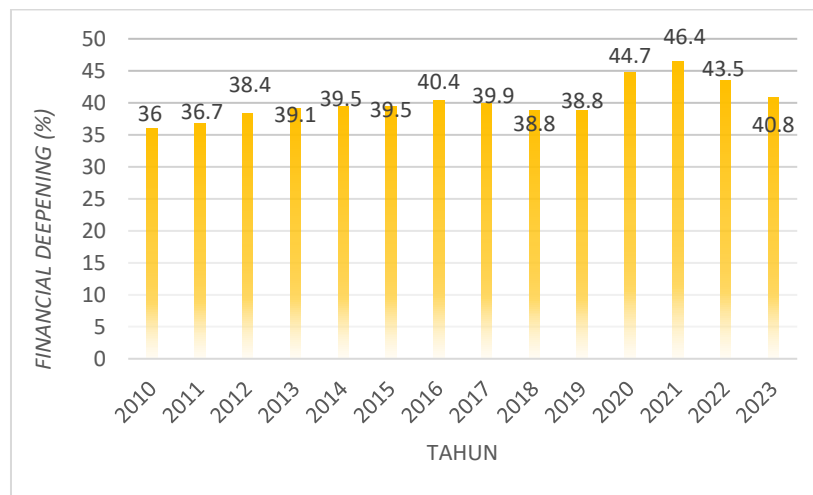
dianggap penting karena sektor ini memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan ketepatan dalam membuat kebijakan moneter agar alokasi dan distribusi keuangan dapat mencakup semua sektor (Putri & Mubin, 2021).

Sistem keuangan yang kurang efisien menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat dan perputaran uang menjadi kurang efisien. Ningrum (2015) menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya berupaya untuk membuat kebijakan yang dapat mendorong inklusi sistem keuangan. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan tabungan domestik, memberikan iklim investasi yang kondusif, mendorong upaya menghapus pagu suku bunga serta mendorong *financial deepening*.

Financial deepening merupakan peningkatan volume pada sektor keuangan dalam suatu perekonomian yang dapat mencakup jumlah total bank, instrumen keuangan, organisasi keuangan maupun pasar keuangan (Lei *et al.*, 2022). *Financial deepening* mampu meningkatkan kredit dan modal, merangsang kegiatan kewirausahaan, mengurangi hambatan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah dalam suatu perekonomian (Beck, 2013a). Penelitian empiris penting yang membangun hubungan antara keuangan dan pertumbuhan adalah King dan Levine (1993), kemudian diperluas oleh Barro (1991) dengan kerangka lintas negara dengan menambahkan variabel keuangan seperti kewajiban likuiditas pada sektor swasta terhadap produk domestik bruto (Rousseau & Wachtel, 2009).

Literatur empiris banyak yang menggunakan rasio M2/PDB sebagai ukuran umum monetisasi dalam mengukur *financial deepening*. Studi awal King dan Levine serta studi lainnya menggunakan perkembangan keuangan yang

lazim seperti rasio M2 terhadap PDB, liabilitas likuid dikurangi uang sempit (M3-M1) dan kredit yang dialokasikan kepada sektor swasta (Rousseau & Wachtel, 2009). Penelitian menggunakan indikator M2/PDB sebagai ukuran monetisasi *financial deepening* di Indonesia.



Gambar 1. 2 Perkembangan *Financial Deepening* Indonesia 2010-2023
Sumber: World Bank (2024)

Gambar 1.2 di atas menjelaskan mengenai perkembangan *financial deepening* Indonesia yang diambil dari nilai M2/PDB dengan data tahunan yang dikeluarkan oleh World Bank. *Financial deepening* pada tahun 2010 sebesar 36 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2016 sebesar 40,4 persen. *Financial deepening* pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 44,7 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 43,5 persen dan 40,8 persen pada 2023. Transaksi ekonomi yang terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi setelah pandemi dapat menjadi sinergi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan moneter dan fiskal.

Peran *financial deepening* diperlukan untuk menyediakan layanan dan berbagai produk investasi guna meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Wasiaturrahma *et al.*, 2019). Beck (2013b) menyatakan bahwa

financial deepening memiliki peran penting dalam bisnis lingkungan hidup dalam lingkup lokal. *Financial deepening* dalam hal ini dapat memberikan keringanan pada kendala keuangan usaha kecil maupun menengah, sehingga dapat meningkatkan alokasi sumber daya dan memberikan peluang untuk masyarakat yang ingin membuka usaha baru (Cao-Alvira & Palacios-Chacón, 2019).

Masyarakat cenderung menggunakan jasa layanan perbankan seperti investasi dengan mempertimbangkan suku bunga. Suku bunga yang rendah dapat meningkatkan investasi sehingga banyak investor yang menanamkan modalnya di perbankan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Suku bunga yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan inflasi, karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga permintaan barang dan jasa meningkat dan harga-harga mengalami kenaikan. Bank sentral akan menaikkan suku bunga yakni BI 7 Day Repo Rate untuk menekan inflasi dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar dapat berkurang, sehingga permintaan pada barang dan jasa juga ikut menurun.

Instrumen dan lembaga keuangan di Indonesia yang semakin banyak tidak membuat semua masyarakat memanfaatkan jasa layanan keuangan tersebut. *Shadow banking* atau *irresponsible finance* dapat terjadi karena adanya aktivitas keuangan diluar lembaga resmi perbankan. Masyarakat menengah ke bawah khususnya masyarakat desa, cenderung masih banyak yang menggunakan jasa layanan bank keliling yang memiliki bunga yang tinggi. *Shadow banking* juga dapat terjadi pada *platform financial technology* (fintech) yang tidak memiliki izin oleh OJK. Kegiatan ekonomi yang tidak resmi cenderung menghambat kelancaran fungsi perekonomian resmi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi (Virta, 2007).

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan telah terjadi kejahatan keuangan berbasis digital yang dilakukan oleh salah satu karyawan bank yang menjual data nasabah di situs *online* (Puspadini, 2023). Data nasabah merupakan aset berharga yang bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Perilaku seperti ini melanggar hukum dan aturan perbankan, karena perbankan tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan data nasabah kecuali atas izin dari pimpinan Bank Indonesia. Kejahatan keuangan berbasis digital yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga marak terjadi dengan mengirimkan tautan *website* maupun *malware* berbahaya, penipuan kode OTP, pencurian data maupun kejahatan-kejahatan berbasis digital lainnya yang dapat merugikan masyarakat.

Tindak kejahatan lainnya yang sering kali terjadi dalam lingkungan lembaga keuangan yakni korupsi. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dapat merampas kebahagiaan masyarakat, menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan. Otoritas Jasa Keuangan harus memperketat pengawasan agar Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat terhindar dari tindakan korupsi.

Pandemi Covid-19 juga menjadi kondisi yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melakukan penanganan, pengobatan dan penyediaan fasilitas kesehatan untuk pasien yang terinfeksi Covid-19. Stabilitas sistem keuangan menjadi terganggu karena beberapa sektor industri mengalami penurunan. Daya beli masyarakat juga menurun karena pendapatannya juga menurun serta banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Trade openness yang diambil dari nilai ekspor dikurangi impor dibagi PDB juga memiliki potensi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses terhadap barang dan jasa, mencapai alokasi dan efisiensi sumber daya serta dapat meningkatkan produktivitas melalui pengetahuan dan teknologi (Barro & Sala-i-Martin, 1995). Negara-negara dengan *trade openness* yang lebih tinggi diperkirakan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding negara-negara dengan *trade openness* yang lebih rendah (Keho, 2017). *Trade openness* dapat memperluas pasar dan mampu meningkatkan pendapatan jika nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor.

Remintansi atau pengiriman uang yang dilakukan oleh imigran internasional kepada keluarga negara asal dalam jangka pendek memungkinkan untuk keluarga penerima dapat melakukan konsumsi lebih banyak sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi rumah tangga. Dalam jangka panjang remitansi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bila dana diinvestasikan (Sanchez, 2022). Pengiriman uang dari imigran juga dapat mendorong stabilitas neraca pembayaran negara asal dan menjadi sumber keuangan negara.

Pengambilan kebijakan keuangan yang baik dan tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kebijakan sektor ekonomi yang kurang tepat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian volume pinjaman dan yang dipinjamkan. Ketidaksesuaian ini dapat berupa dana subsidi, dana talangan maupun perilaku istimewa yang terjadi antara sektor satu dengan sektor lainnya. Perilaku seperti ini dapat mendistorsi proses akumulasi sehingga dapat mengurangi capaian perekonomian dalam jangka panjang (Bhattarai, 2015).

Acedański dan Pietrucha (2019) dalam penelitiannya memiliki tujuan untuk mengetahui peran level dan dinamika *financial deepening* terhadap fluktuasi PDB. Model pengujian menggunakan metode GMM (*Generalized Method of Moments*) dan model SAR (*Spatial Autocorrelation*). Hasil penelitian menunjukkan peran tingkat *financial deepening* konsisten memiliki hubungan yang tidak linier. Tingkat *financial deepening* yang lebih tinggi dikaitkan dengan volatilitas yang lebih tinggi ketika ukuran *financial deepening* melebihi 96–124 persen dari PDB. Dinamika *financial deepening* yang lebih tinggi dan diukur dengan kredit swasta dapat meningkatkan volatilitas PDB di banyak negara selama 45 tahun terakhir.

Penelitian yang dilakukan Wasiaturrahma *et al.* (2019) memiliki tujuan untuk menganalisis dampak *financial deepening* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1975 sampai dengan 2016. Model pengujian menggunakan kombinasi uji ARDL untuk menentukan pengaruh jangka panjang dan uji ECM untuk menentukan pengaruh jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial deepening* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel pengeluaran pemerintah, uang beredar dan keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh simultan, namun hanya variabel keterbukaan perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode penelitian.

Putri dan Mubin (2021) dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis *financial deepening*, nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2019 dengan menggunakan metode VECM. Hasil menunjukkan nilai tukar dan suku bunga memiliki interaksi negatif terhadap

pertumbuhan ekonomi, sedangkan *financial deepening* dalam jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peneliti Acedański dan Pietrucha (2019), Wasiaturrahma *et al* (2019) serta Putri dan Mubin (2021) dalam penelitiannya memiliki gap seperti metode, sampel dan hasil. Hal ini menunjukkan, bahwa setiap penelitian satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Berdasarkan perbedaan penelitian yang dilakukan, maka studi ini dilakukan dengan mengembangkan beberapa hal seperti jenis sampel, periode dan metode yang digunakan. Perbedaan ini dilakukan untuk memberikan kontribusi mengenai *financial deepening*, sehingga kesenjangan pada penelitian terdahulu dapat didukung pada penelitian.

Pengembangan penelitian menggunakan variabel independen berupa *financial deepening* dengan indikator M2/PDB, serta menambahkan variabel kontrol yakni inflasi sebagai variabel moneter, *trade openness* dan remitansi sebagai variabel non moneter, serta variabel dummy untuk melihat pengaruh masa pandemi dan bukan masa pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan metode *Error Correction Model* (ECM). Peneliti menggunakan data *time series* triwulan di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2023.

Peneliti memilih menggunakan data *time series* triwulan karena penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan variabel M2/PDB untuk *financial deepening* cenderung banyak yang menggunakan data tahunan. Penelitian menggunakan variabel kontrol berupa variabel non moneter berupa *trade openness* dan remitansi, karena sebagian besar studi empiris yang digunakan dalam riset ini menggunakan variabel moneter saja. Berdasarkan isu dan penelitian-penelitian sebelumnya yang belum banyak mendapatkan

perhatian mengenai *financial deepening* di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Financial Deepening* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan mengenai *financial deepening* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana dengan adanya *financial deepening* dapat meningkatkan volume layanan keuangan, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dapat menjadi reservoir tabungan dan dana yang menganggur untuk dialokasikan kepada pengusaha, rumah tangga dan pemerintah untuk proyek investasi dan tujuan produktif lainnya dengan tujuan memaksimalkan keuntungan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan diteliti dalam penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis *financial deepening* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu moneter dan perbankan mengenai pengaruh *financial deepening* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2023.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Peneliti Lain

Penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dan menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya, sehingga kesenjangan dari penelitian sebelumnya dapat didukung oleh penelitian yang nantinya dapat menjadi lebih relevan.

- Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi mengenai pengaruh *financial deepening* terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode penelitian.